

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUJATMIKO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



SUJATMIKO, S.H., M.H

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum

REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	11%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	7,5%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.096.931.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 3.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 149.000.000,-
4. Pelaksanaan Indikator Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibiayai oleh pihak yang berperkara per perkara	Rp. 135.000,-

Pangkalan Bun, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



SUJATMIKO, S.H., M.H

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum